

# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

## KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

### I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Capaian Kinerja Makro Kabupaten Katingan Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja Indikator
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,90	74,37	0,47 poin
2	Angka Kemiskinan	4,99	5,26	0,27 Persen poin
3	Angka Pengangguran	4,96	4,88	-0,12 Persen poin
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,98	4,67	-1.31 Persen poin
5	Pendapatan per Kapita	63.511*	67.939**	4.428 ribu rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,261	0,253	0,008 poin

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2025

### II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

#### 1. Urusan Pendidikan

##### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	92,73 %	85,52
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum	72,79 %	54,24

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
	menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	84,92 %	76,69

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Tahun 2025

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2025**

NO	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	3	4	5	6
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.749.384.493	24.820.519.186	85,45
2	Program Pendidikan Non Formal	74.100.000	61.174.800	82,56
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.284.555.431	6.136.975.719	84,25

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Tahun 2025

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Katingan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2025 untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah cukup maksimal 85,52% pada tahun 2025 meskipun belum 100%, penyebabnya adalah karena pendataan anak usia 7 tahun sampai dengan anak usia 16 tahun telah membaik, serta masyarakat mulai sadar pentingnya pendidikan wajar 13 tahun;
2. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2025 mengalami Penurunan 8,28 % untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 84,97 % tahun 2024 dan 76,69 % untuk tahun 2025, karena satuan pendidikan mulai maksimal dalam pendataan usia 5 tahun sampai dengan usia 6

tahun pada inputan Dapodik, dan memang masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu masih ada Desa yang satuan PAUD belum memiliki NPSN; banyak sekolah yang kosong tidak ada siswa dan ada juga siswa yg bersekolah didaerah lain karena keinginan orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya ditempat tersebut kenapa menurun sebab kondisi jalan menuju sekolah yang ingin dicapai tidak sesuai kemauan siswa tersebut dan tidak dapat terlaksana dengan baik karena keterbatasan akses jalan yang baik;

3. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 6,83 % untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2024 yaitu **72,79 %** dan pada tahun 2025 menjadi 54,24 % memang belum maksimalnya menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan tetap dengan fokus ke PKBM dengan *Satu Kecamatan Satu PKBM; kenapa persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan masih belum optimal karena masih banyak siswa yang tidak bersekolah termasuk didaerah-daerah terpencil di Kabupaten Katingan.*
4. Penyerapan Anggaran cukup baik namun masih banyak kekurangan dalam hal pendidikan karena keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, dilihat dari penyerapan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yaitu 85,45 % dan Program Pendidikan Non Formal 82,56 %, serta Program Pendidikan Anak Usia Dini 84,25 %.

## 2. Urusan Kesehatan

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	79,46 %	69,87%
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	67,72 %	64,6%
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	78,84 %	75,66%
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	80,44 %	90,62%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	89,48 %	101,2%
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	80,43%	78,09%
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	92,69 %	81,94%
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	92,27 %	90,08%
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	97,51 %	121,6%
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	93,66 %	93,5%
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	87,40 %	103,6%
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	86,89 %	81,52%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Tahun 2025

#### B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025 :

**Tabel 2.6**

**Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	453,019,150	432,109,860	95.38%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	568,800,000	535,258,840	94.10%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	366,335,907	322,097,900	87.92%
4	Pelayanan kesehatan balita	150,000,000	149,303,600	99.54%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	303,135,000	302,340,000	99.74%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	250,000,000	248,356,832	99.34%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	134,960,000	124,744,559	92.43%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	61,631,500	61,596,050	99.94%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	82,687,500	82,682,310	99.99%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	105,000,000	104,934,000	99.94%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	222,040,000	221,936,792	99.95%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	78,750,000	78,640,000	99,86 %
<b>TOTAL</b>		<b>2,776,359,057</b>	<b>2,275,533,901</b>	<b>81.96%</b>

**Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Tahun 2025.**

### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Kabupaten Katingan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Target sasaran program menggunakan data pusdatin bukan data riil sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah sasaran yang tercatat dengan jumlah sasaran aktual di wilayah kerja dan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan Kesehatan ibu hamil belum berjalan optimal.
2. Masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan bukan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak di fasilitas kesehatan (dirumah) serta akses fasyankes yang jauh dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Katingan.
3. Tidak semua hasil layanan kesehatan pada bayi tercatat dengan baik dan tidak semua desa di wilayah Kabupaten Katingan memiliki tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi layanan Kesehatan.
4. Tidak semua hasil layanan kesehatan pada balita tercatat dengan baik dan tidak semua desa di wilayah Kabupaten Katingan memiliki tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi layanan kesehatan balita.

5. Untuk beberapa puskesmas lainnya, masih kurang dari 100% karena beberapa orang siswa tidak hadir karena ijin, tanpa keterangan atau sakit saat dilaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan dasar tersebut dan tidak dilakukan pemeriksaan ulang setelah kegiatan
  6. Belum optimal hubungan antar sektor dan lemahnya kerja sama lintas program
  7. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia masih cenderung terpusat di kegiatan posyandu, sehingga jangkauan layanan menjadi terbatas. Lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tidak aktif menghadiri posyandu berpotensi tidak terlayani oleh program kesehatan.
  8. Belum optimalnya kerjasama antar sektor untuk kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular, kurangnya kesadaran masyarakat dan menganggap sepele penyakit hipertensi.
  9. Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar, kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehat.
  10. Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan tidak mendapat perawatan.
  11. Masih ada puskesmas yang belum memiliki tenaga laboratorium sehingga mengalami kendala dalam melakukan penegakkan diagnose TB melalui pemeriksaan bakteriologis TB dan kurang alat dan logistik untuk pemeriksaan TB di Puskesmas.
  12. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara puskesmas dengan klinik bidan swasta maupun klinik perusahaan dalam pelaksanaan skrining HIV ibu hamil, Masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan tes HIV, Kurangnya media KIE HIV di fasyankes dan Kesulitan dalam mendapatkan/menjaring sasaran populasi kunci.
3. Urusan Pekerjaan Umum
- A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	62,45%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	69,36%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan, Tahun 2025

## B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

NO	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.494.694.650,84	1.492.392.800,00	99,85
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	699.157.034,74	698.396.500,00	99,89

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan, Tahun 2025

## C. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Katingan pada Tahun 2025 yaitu Terjadinya perbedaan antara rencana dari beberapa program/kegiatan dengan kondisi di lapangan, khususnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.

### 4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.8**  
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0 %	100%
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi	0 %	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
	penyediaan rumah yang layak huni		

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan, Tahun 2025

#### B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 1.9**  
**Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	3	4	5	6
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100.000.000 (Bangun Baru) 460.000.000 (Rehabilitasi)	100.000.000 (2 unit) 460.000.000 (23 unit)	100 100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-	-	0

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan, Tahun 2025

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

- Pada Layanan dasar SPM seperti penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana sering berupa rumah-rumah yang tidak layak huni, tidak sepenuhnya rumah rusak berat/sedang akibat bencana seperti banjir yang menimpa.
- Layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran, dan dalam pelaksanaannya perlu kolaborasi antar beberapa instansi terkait yang saling mendukung, sejauh ini yang dilakukan hanya sebatas pendataan.
- Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum ada dibuat regulasi hukum berupa Peraturan Bupati Katingan yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai dasar dalam pelaksanaan tahapan SPM baik dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana sampai pada tercapainya pelaksanaan pemenuhan SPM terhadap penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.10**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebaran	100 %	100 %
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,56 %	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0,15 %	100 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Katingan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 1.11**  
**Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025**

NO	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketenteraman dan	Rp. 780.472.903,-	Rp. 756.666.370,-	96.94

NO	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
	Ketertiban Umum	Rp. 769.395.653,-	Rp. 750.577.870,-	97,55
		Rp. 11.077.250,-	Rp. 6.088.500,-	54,96
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Rp. 451.602.993,-	Rp. 449.869.755,-	99,61
		Rp. 451.602.993,-	Rp. 449.869.755,-	99,61
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Rp. 533.447.025,00	Rp. 510.053.884,00	95,61 %
		Rp. 85.79.400,00	Rp. 66.842.400,00	77,99%
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 97.601.600,00	Rp. 88.966.355,00	91,15%
		Rp. 0	Rp. 0	0%
		Rp. 98.656.785,00	Rp. 94.636.810,00	87,18%
		Rp. 592.954.140,00	Rp. 427.357.000,00	74,93%
		Rp. 31.603.990,00	Rp. 5.445.700,00	17,23%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 38.817.364,00	Rp. 30.326.900,00	78,13 %
		Rp. 59.900.000,00	Rp. 50.395.300,00	84,13 %
		Rp. 131.227.715,00	Rp. 38.624.900,00	29,43 %
		Rp. 491.970.548,00	Rp. 459.069.300,00	93 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2025

### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belum Kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan baik secara kualitas dan kuantitas, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dengan luas Kabupaten Katingan adalah 20.382,26 kilometer persegi, terdiri dari 13 kecamatan 154 Desa dan 7 Kelurahan dalam mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan sangat diperlukan melalui kegiatan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di 154 Desa dan 7 Kelurahan di Kabupaten Katingan.

2. Belum termuatnya pemenuhan urusan wajib sub urusan bencana dalam program prioritas.
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana.
4. Terbatasnya kapasitas kemampuan sumberdaya manusia penanggulangan bencana.
5. Luasnya wilayah rawan bencana dan terbatasnya sarana prasarana dan teknologi untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

## 6. Urusan Sosial

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.12**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	2	3	4
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
4	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100 %	100 %
5	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	16 %	100%

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Tahun 2025

### B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 1.13**  
**Realisasi Belanja Urusan Sosial Tahun 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	92,259,091.89	78,019,427.79	85%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	184,570,626.68	148,215,140.20	80%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	115,441,109.49	106,286,749.83	92%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	37,536,897.94	23,323,782.19	62%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Program Penanganan Bencana	455,259,533	383,850,946	84%

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Tahun 2025

**C. Permasalahan Yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi Urusan Sosial pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Kondisi geografis wilayah yang luas serta akses transportasi yang terbatas dan mahal sehingga pengumpulan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM tidak optimal.
2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur dalam perhitungan kebutuhan layanan.
3. Anggaran yang terbatas membuat kualitas pelayanan SPM belum optimal.
4. Terbatasnya jumlah Peksos yang mengerti dan memahami fungsinya, membuat layanan kurang optimal.

### III. EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berikut ini ringkasan hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya:

#### 1. Hasil EPPD Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No :100.2.17-2019 Tahun 2025 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Kabupaten Katingan berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **2,8134** dan status kinerja **Sedang**. Sedangkan untuk penilaian EPPD T.A. 2024 masih dalam proses.

#### 2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor: 45.A/LHP/XIX.PAL/07/2025 tanggal 16 Juli 2025 Kabupaten Katingan berhasil mendapatkan Opini **WTP** (Wajar Tanpa Pengecualian) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024.

### IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun 2025 rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.14**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun 2025**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
I	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.392.147.145.050,00</b>	<b>1.315.057.245.233,02</b>	<b>94,46</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102.452.285.800,00</b>	<b>90.323.641.231,17</b>	<b>88,16</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	65.596.000.000,00	46.174.650.114,30	70,39
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.136.776.000,00	8.406.616.056,00	117,79
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.428.321.792,77	97,95
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.219.509.800,00	32.314.053.268,10	123,24

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.281.613.593.000,00</b>	<b>1.214.940.187.519,00</b>	<b>94,80</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.238.046.993.000,00	1.168.968.090.680,00	94,42
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.566.600.000,00	45.972.096.839,00	105,52
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>8.081.266.250,00</b>	<b>9.793.416.483,70</b>	<b>121,19</b>
	Pendapatan Hibah	81.266.250,00	482.852.580,00	594,16
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000.000,00	9.310.563.903,70	116,38

Sumber : BAPENDA Kabupaten Katingan, Tahun 2025 (Data sementara / unaudited)

**Tabel 1.15**  
**Rincian Pengeluaran Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025**

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.446.825.410.605,97</b>	<b>1.365.740.336.341,34</b>	<b>94,39</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>941.460.690.163,25</b>	<b>883.025.931.282,62</b>	<b>93,79</b>
Belanja Pegawai	562.140.159.142,99	526.995.079.581,53	93,74
Belanja Barang dan Jasa	331.902.909.013,94	316.035.543.340,09	95,21
Belanja Subsidi	1.700.000.000,00	1.093.601.700,00	64,32
Belanja Hibah	43.939.874.486,32	37.133.977.203,00	84,51
Belanja Bantuan Sosial	1.777.747.520,00	1.767.729.458,00	99,43
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>263.477.787.642,72</b>	<b>251.442.819.954,72</b>	<b>95,43</b>
Belanja Modal Tanah	742.500.000,00	683.500.000,00	92,05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.672.310.560,68	71.025.455.794,00	97,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.315.440.769,85	111.725.356.633,99	95,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.182.963.412,19	67.448.604.554,73	93,44
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	470.172.900,00	465.602.972,00	99,02
Belanja Modal Aset Lainnya	94.400.000,00	94.300.000,00	99,89
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>291.942.800,00</b>	<b>36,49</b>
Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	291.942.800,00	36,49
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>241.086.932.800</b>	<b>230.979.642.304,00</b>	<b>95,80</b>
Belanja Bagi Hasil	7.500.000.000,00	7.499.999.988,00	99,46
Belanja Bantuan Keuangan	233.586.932.800,00	223.479.642.316,00	95,67

<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(54.678.265.555,97)</b>	<b>(50.257.148.975,97)</b>	<b>91,91</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<b>54.678.265.555,97</b>	<b>56.697.059.474,97</b>	<b>103,69</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		0,00	0,000	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>54.678.265.555,97</b>	<b>56.697.059.474,97</b>	<b>103,69</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.439.910.499,00</b>	<b>0,00</b>

*Sumber : BKAD Kabupaten Katingan, Tahun 2025 (data sementara / unaudited)*

## V. INOVASI DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat upaya perwujudan sasaran tersebut, langkah inovatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan dilakukan berdasarkan aspek peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selama pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Katingan, telah dilakukan langkah inovatif.

**Tabel 1.16**  
**Inovasi Daerah**

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan	Status Produk Inovasi
1	5	2	3	4
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SIIP Bang (Sistem Informasi Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Katingan)	Program riset dan inovasi daerah Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Implementasi
2	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	IDE METAL (Inovasi Desa Melek Digital Katingan)	Program pengelolaan aplikasi informatika Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Implementasi
3	Dinas Pendidikan SMPN 3 Katingan Kuala	BAKAT ECOBRIK DI SMPN 3 Katingan Kuala		Implementasi
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	HADOHOP VIA DARING	Program pendaftaran penduduk Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	Implementasi
5	Dinas Lingkungan Hidup	SI-API (Sistem Informasi Prediksi Api)	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Implementasi
6	Kecamatan Katingan Hilir Kelurahan Kasongan Baru	GERBANG PARAGA (Gerakan Pengembangan Pangan Paraga)	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Implementasi
7	Kecamatan Katingan Kuala	GEMARI BESTI (Gemar Makan Ikan Bebas	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Implementasi

		Stunting)	publik Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	JEMPOL (Jelajah Media Positif Online Literasi)		Implementasi
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	SIPAT (Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah)	Program redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Implementasi
10	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	SIKELING (Siaran Keliling) Tanjung Indu Marko		Implementasi
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	GEN_IT (Generasi Teknologi dan Informasi Katingan)	Program aplikasi informatika Kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Implementasi
12	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pelat Baja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Inisiatif
13	Dinas Pendapatan Daerah	Barcode Bajakah	Program pengelolaan pendapatan daerah Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Implementasi
14	Dinas Kesehatan Puskesmas Mendawai	Maja Bumil	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Implementasi
15	Dinas Kesehatan Puskesmas Tumbang Sanamang	Club Catin Uras Bahalap Ih	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Implementasi
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengembangan Durian Lokal Katingan Unggul	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Implementasi

**Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Tahun 2025**